



Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja BPKAD dengan Moderasi Komitmen Organisasi

The Effect of Accountability and Transparency on BPKAD Performance with Organizational Commitment as a Moderating Variable

Holil Absor, Kabul Wahyu Utomo & Syafrudin

Program Pascasarjana, Universitas Terbuka, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 53 pegawai BPKAD Kabupaten Sarolangun yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun, sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun. Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja, serta tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun lebih dipengaruhi oleh keterbukaan informasi daripada akuntabilitas yang bersifat administratif maupun komitmen organisasi sebagai faktor individual. Oleh karena itu, penguatan transparansi perlu diarahkan pada penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, kinerja organisasi, BPKAD

Abstract

This study aims to analyze the effect of accountability and transparency on the performance of the Regional Financial and Asset Management Agency of Sarolangun Regency, with organizational commitment as a moderating variable. This study employed a quantitative approach with an explanatory research design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 53 employees of the Regional Financial and Asset Management Agency of Sarolangun Regency selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis. The results show that accountability has no significant effect on organizational performance, while transparency has a positive and significant effect on organizational performance. The moderation test also indicates that organizational commitment does not moderate the effect of accountability on performance and does not moderate the effect of transparency on performance. These findings suggest that the performance improvement of the Regional Financial and Asset Management Agency of Sarolangun Regency is more strongly associated with information transparency than with administrative accountability or organizational commitment as an individual factor. Therefore, strengthening transparency should be directed toward providing accurate, timely, accessible, and accountable information.

Keywords: *accountability, transparency, organizational commitment, organizational performance, regional financial and asset management agency*

How to Cite: Absor, H., Utomo, K. W., & Syafrudin. (2026). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja BPKAD dengan Moderasi Komitmen Organisasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 5(2): 1-10

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset secara akuntabel, transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik (Karianga, 2017). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan daerah. Kewenangan tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan, tetapi sekaligus menimbulkan tuntutan yang lebih besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Nailufar et al., 2026; Yusnety, 2025). Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, melainkan juga sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam tata kelola keuangan daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Aituarauw, 2021). BPKAD berperan dalam proses pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, serta pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, kinerja BPKAD menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Rohmi, 2025; Theresiana & Supriyadi, 2025). Apabila akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan tidak berjalan secara optimal, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran dapat kehilangan daya kendali dan sulit dinilai secara objektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BPKAD perlu dikaji melalui faktor-faktor tata kelola yang secara langsung berhubungan dengan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi (Jiman et al., 2025).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola sektor publik. Akuntabilitas menuntut organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta pencapaian kinerja kepada pihak yang memiliki hak untuk menilai dan mengawasi (Putri et al., 2025). Dalam organisasi pemerintah daerah, akuntabilitas tidak hanya berarti tersedianya laporan pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup kejelasan sasaran, kesesuaian antara program dan capaian kinerja, serta kemampuan organisasi untuk menunjukkan bahwa sumber daya publik digunakan secara tepat (DR HA Rusdiana & Nasihudin, 2021; Nabila & Maulina, 2025). Dengan akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki pelaksanaan program, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang benar, jelas, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi memungkinkan masyarakat, lembaga pengawas, dan pihak terkait lainnya untuk mengetahui proses penyusunan anggaran, pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah. Keterbukaan informasi tersebut dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan mendorong aparat pemerintah untuk bekerja secara lebih tertib, efektif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol publik terhadap kinerja pemerintah (Rosidah et al., 2023; Sagala, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi pemerintah. Auditya et al. (2013) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga memperkuat pandangan bahwa prinsip tata kelola yang baik dapat mendorong peningkatan kinerja sektor publik. Saputra & Darwanis (2014) juga menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi memiliki keterkaitan dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah. Sementara itu, Amali & Suwandi (2021) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah, yang menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tersebut dapat berbeda sesuai dengan konteks organisasi dan karakteristik tata kelola daerah.

Perbedaan temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja organisasi pemerintah belum sepenuhnya dapat dijelaskan melalui hubungan langsung. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan kinerja, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak selalu menghasilkan pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan kinerja. Salah satu faktor yang relevan untuk dikaji adalah komitmen organisasi, karena komitmen organisasi mencerminkan keterikatan, loyalitas, dan kesediaan pegawai untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Komitmen organisasi penting dikaji dalam hubungan antara tata kelola dan kinerja karena penerapan akuntabilitas dan transparansi tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada kesediaan aparatur untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas kerja. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi tinggi diharapkan lebih mampu menerapkan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, dan orientasi kinerja secara konsisten. Dengan demikian, komitmen organisasi dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun (Prasetio, 2024; PRATAMA et al., 2026; Shaleh & Firman, 2018).

Penelitian ini berfokus pada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Fokus ini dipilih karena BPKAD memiliki tanggung jawab strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga kinerjanya berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi berhubungan dengan kinerja BPKAD, serta apakah komitmen organisasi pegawai mampu memperkuat hubungan antara prinsip-prinsip tata kelola tersebut dengan kinerja organisasi.

Dari fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun, serta menganalisis peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian tata kelola sektor publik, khususnya mengenai hubungan antara akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan kinerja organisasi pengelola keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, serta menganalisis peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Sarolangun karena instansi ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Sarolangun. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria responden adalah pegawai yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan terkait pengelolaan keuangan, penatausahaan, pelaporan, pengelolaan aset, perencanaan, evaluasi, atau pelaksanaan program pada BPKAD Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan data yang dianalisis, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 53 responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun, yang mencakup pencapaian target kerja, efektivitas pelaksanaan tugas, efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas hasil kerja, dan ketepatan pelaksanaan program. Variabel independen terdiri atas akuntabilitas dan transparansi, sedangkan variabel moderasi adalah komitmen organisasi.

Akuntabilitas diukur melalui kejelasan sasaran kegiatan, pertanggungjawaban pelaksanaan program, pelaporan hasil kerja, kesesuaian penggunaan anggaran, dan evaluasi capaian kinerja. Transparansi diukur melalui keterbukaan informasi, kemudahan akses informasi, ketepatan waktu penyampaian informasi, kejelasan prosedur, dan ketersediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan serta program organisasi. Komitmen organisasi diukur melalui loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pelaksanaan tugas, kesediaan mendukung pencapaian tujuan organisasi, rasa memiliki terhadap organisasi, dan kemauan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun, sedangkan Moderated Regression Analysis digunakan untuk menguji peran komitmen organisasi dalam memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja. Sebelum pengujian hipotesis, data diuji melalui uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan tingkat signifikansi 5 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Persamaan pertama mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah, setelah sesudah melalui langkah proses pengolahan data didapatkan hasil, dan diimplementasikan dalam bentuk analisis berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.690	.674		5.476	.000
X1	-.245	.156	-.221	-1.569	.123
X2	.341	.130	.369	2.621	.012

Sumber: Data primer (diolah), 2024

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,690 - 0,245X_1 + 0,341X_2 + e$$

(1,569)** (2,621)**

Keterangan: ** signifikansi pada alpha 15%

Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X1) sebesar -0,245 artinya jika akuntabilitas ditingkatkan satu satuan, maka kinerja pemerintah daerah akan turun sebesar 0,245 satuan. Berdasarkan uji t diperoleh nilai $t_{hitung} = 1,569$ dengan signifikansi 0,123 lebih besar dari 0,15 yang memiliki arti jika akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada tingkat alpha 15%.

Koefisien regresi variabel transparansi (X2) sebesar 0,341 artinya jika transparansi meningkat satu satuan maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,341 satuan. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung 2,621 dengan signifikansi 0,012 yang memiliki arti bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	.581	2	.290	3.678	.032 ^a
	Residual	3.948	50	.079		
	Total	4.528	52			

Sumber: Data primer (diolah), 2024

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai Fhitung sebesar 3,678 dengan signifikansi $0,032 < 0,15$ artinya variabel akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. error of the Estimate
1	.358 ^a	.128	.093	.281	

Sumber: Data primer (diolah), 2024

Berdasarkan tabel 3 diperoleh nilai *Adj. R. Square* (R²) 0,093 artinya variabel kinerja pemerintah daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun diejelaskan oleh variabel akuntabilitas dan transparansi sebesar 9,3%, sedangkan sisanya sebesar 90,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hipotesis keempat dan kelima menguji akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda dengan uji interaksi atau disebut *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

1. Interaksi akuntabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Interaksi Akuntabilitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	4.241		
	Akuntabilitas	-.252	.195	-.228	-1.296	.201
	Komitmen organisasi	.036	.157	.037	.228	.820
	Akuntabilitas * komitmen organisasi	.043	.032	.255	1.325	.191

Sumber: Data primer (diolah), 2024

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai thitung variabel akuntabilitas sebesar 1,296 pada tingkat signifikansi 0,201 yang berarti $> 0,15$, maka uji t dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Nilai thitung atas interaksi antara akuntabilitas dan komitmen organisasi sebesar 1,325 pada tingkat signifikansi 0,191 yang artinya tidak signifikan karena $> 0,15$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak mampu memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4 maka persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*, yaitu:

$$Y = 4,241 - 0,252X_1 + 0,036Z + 0,191X_1 * Z + 0,891$$

2. Interaksi transparansi

Tabel 5. Hasil Uji Interaksi Transparansi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.071	.873		2.372	.022
Transparansi	.341	.186	.369	1.835	.073
Komitmen organisasi	.230	.193	.238	1.196	.238
Transparansi * komitmen organisasi	-.106	-.042	-.106	-.437	.664

Sumber: Data primer (diolah), 2024

Berdasarkan tabel 5 diketahui nilai t_{hitung} variabel transparansi sebesar 0,341 pada tingkat signifikansi 0,073 yang berarti $< 0,15$, maka uji t dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Nilai t_{hitung} atas interaksi antara transparansi dan komitmen organisasi sebesar 0,437 pada tingkat signifikansi 0,664 yang artinya tidak signifikan karena $> 0,15$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi tidak mampu memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 5 maka persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel *moderating*, yaitu:

$$Y = 2,071 + 0,341X_2 + 0,230Z + 0,664X_2 * Z + 0,873$$

Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,245 dengan nilai signifikansi 0,123. Berdasarkan tingkat signifikansi 5 persen, nilai tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas dalam penelitian ini belum terbukti secara statistik mampu meningkatkan kinerja organisasi. Arah koefisien yang negatif juga menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas dan kinerja tidak berjalan sebagaimana asumsi umum yang menyatakan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, semakin tinggi pula kinerja organisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada BPKAD Kabupaten Sarolangun kemungkinan masih lebih banyak dipahami sebagai kewajiban administratif daripada sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kinerja. Dalam organisasi pemerintah, akuntabilitas sering diwujudkan melalui penyusunan laporan, pemenuhan dokumen pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap prosedur formal. Meskipun aspek tersebut penting, akuntabilitas yang hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi belum tentu secara langsung mendorong perbaikan efektivitas kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, atau peningkatan kualitas hasil kerja organisasi.

Tidak signifikannya pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja juga dapat menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban yang diterapkan belum sepenuhnya terhubung dengan mekanisme evaluasi kinerja yang substantif. Akuntabilitas seharusnya tidak hanya berhenti pada pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan keterkaitan antara rencana kerja, pelaksanaan program, capaian output, dan hasil yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. Apabila akuntabilitas belum digunakan sebagai dasar perbaikan keputusan, pengendalian program, dan evaluasi kinerja, maka keberadaannya belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena konteks organisasi, kualitas sistem pengendalian, budaya kerja, kapasitas aparatur, serta mekanisme evaluasi kinerja yang berbeda pada setiap daerah. Dalam konteks BPKAD Kabupaten Sarolangun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas belum menjadi faktor dominan dalam menjelaskan variasi kinerja organisasi. Hal ini juga sejalan dengan nilai koefisien determinasi yang relatif rendah, sehingga kinerja BPKAD kemungkinan lebih banyak dipengaruhi

oleh faktor lain di luar akuntabilitas, seperti kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan kualitas perencanaan anggaran.

Dengan demikian, akuntabilitas tetap merupakan prinsip penting dalam tata kelola keuangan daerah, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapannya perlu diarahkan pada akuntabilitas yang lebih substantif. BPKAD Kabupaten Sarolangun perlu memastikan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban pelaporan, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai keberhasilan program, memperbaiki kelemahan pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan organisasi.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa transparansi memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,341 dengan nilai signifikansi 0,012. Berdasarkan tingkat signifikansi 5 persen, nilai tersebut menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian, semakin baik penerapan transparansi dalam organisasi, semakin tinggi pula kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun.

Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. Transparansi memungkinkan informasi mengenai prosedur kerja, pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan hasil kegiatan dapat diakses secara lebih jelas oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks BPKAD, transparansi dapat membantu memperjelas proses kerja, memperkuat koordinasi internal, dan mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas. Ketika informasi tersedia secara terbuka, tepat waktu, dan mudah dipahami, pegawai memiliki dasar yang lebih baik dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan sasaran organisasi.

Pengaruh positif transparansi terhadap kinerja juga dapat dijelaskan melalui fungsi transparansi sebagai mekanisme pengawasan. Keterbukaan informasi membuat proses pengelolaan keuangan dan aset daerah lebih mudah dipantau, baik oleh pihak internal organisasi maupun oleh pemangku kepentingan eksternal. Kondisi ini dapat mendorong aparatur untuk bekerja lebih tertib, cermat, dan bertanggung jawab karena setiap proses dan hasil kerja memiliki peluang lebih besar untuk dievaluasi. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi prinsip administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan disiplin organisasi dan kualitas pelaksanaan program.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam organisasi sektor publik, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong efektivitas kinerja. Apabila informasi mengenai pengelolaan keuangan dan program organisasi tersedia secara terbuka, maka proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung lebih terarah. Hal ini pada akhirnya mendukung peningkatan kinerja organisasi, terutama pada perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset.

Dengan demikian, transparansi terbukti menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu, organisasi perlu terus memperkuat keterbukaan informasi melalui penyediaan data yang akurat, prosedur yang jelas, pelaporan yang tepat waktu, serta akses informasi yang mudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penguatan transparansi tidak hanya penting untuk memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi secara lebih berkelanjutan.

3. Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun

Hasil pengujian Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa interaksi antara akuntabilitas dan komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi 0,191. Berdasarkan tingkat signifikansi 5 persen, nilai tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya komitmen organisasi pegawai

belum terbukti secara statistik dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam konteks BPKAD Kabupaten Sarolangun kemungkinan lebih banyak ditentukan oleh sistem, regulasi, prosedur kerja, dan mekanisme pertanggungjawaban formal daripada oleh komitmen individual pegawai. Dalam organisasi pemerintah, pelaksanaan akuntabilitas umumnya diatur melalui ketentuan administratif, standar pelaporan, mekanisme pengawasan, serta kewajiban pertanggungjawaban yang bersifat formal. Oleh karena itu, meskipun pegawai memiliki loyalitas dan keterikatan terhadap organisasi, kondisi tersebut belum tentu secara langsung memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja apabila sistem akuntabilitas yang berjalan masih bersifat prosedural.

Tidak signifikannya peran moderasi komitmen organisasi juga dapat menunjukkan bahwa komitmen pegawai belum sepenuhnya terhubung dengan praktik akuntabilitas yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi dapat saja menunjukkan kepatuhan terhadap tugas dan loyalitas terhadap organisasi, tetapi apabila mekanisme akuntabilitas belum digunakan sebagai dasar evaluasi, perbaikan program, dan pengambilan keputusan, maka komitmen tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah akuntabilitas menjadi peningkatan kinerja yang nyata. Dengan kata lain, komitmen organisasi tidak otomatis memperkuat hubungan akuntabilitas dan kinerja tanpa didukung oleh sistem pertanggungjawaban yang substantif.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas perlu dipahami sebagai mekanisme kelembagaan, bukan hanya sebagai perilaku individual. Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas yang efektif membutuhkan keterpaduan antara regulasi, struktur pengawasan, kualitas pelaporan, indikator kinerja yang jelas, serta budaya evaluasi yang kuat. Apabila unsur-unsur tersebut belum berjalan optimal, maka komitmen organisasi pegawai belum cukup untuk memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas perlu diarahkan pada perbaikan sistem dan proses organisasi, bukan hanya pada peningkatan loyalitas atau keterikatan pegawai.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa komitmen organisasi belum berperan sebagai kondisi yang memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun. Upaya peningkatan kinerja melalui akuntabilitas perlu dilakukan dengan memperbaiki kualitas sistem pertanggungjawaban, memperjelas indikator kinerja, memperkuat evaluasi program, serta memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dasar perbaikan organisasi. Komitmen pegawai tetap penting, tetapi perannya perlu didukung oleh sistem akuntabilitas yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil.

4. Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun

Hasil pengujian Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa interaksi antara transparansi dan komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi 0,664. Berdasarkan tingkat signifikansi 5 persen, nilai tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya komitmen organisasi pegawai belum terbukti secara statistik dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara transparansi dan kinerja organisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap kinerja BPKAD lebih bersifat langsung daripada bergantung pada tingkat komitmen organisasi pegawai. Transparansi dalam organisasi pemerintah umumnya diwujudkan melalui sistem informasi, prosedur penyampaian informasi, aturan keterbukaan, standar pelaporan, dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, meskipun pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi, kondisi tersebut belum tentu memperkuat pengaruh transparansi terhadap kinerja apabila keterbukaan informasi lebih banyak ditentukan oleh sistem dan kebijakan organisasi.

Tidak signifikannya peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi juga mengindikasikan bahwa transparansi merupakan praktik kelembagaan yang tidak sepenuhnya

bergantung pada loyalitas atau keterikatan individu terhadap organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi dapat mendukung pelaksanaan tugas organisasi, tetapi transparansi membutuhkan dukungan yang lebih luas, seperti ketersediaan data yang akurat, mekanisme publikasi informasi yang jelas, penggunaan teknologi informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi publik. Tanpa dukungan sistem tersebut, komitmen pegawai belum cukup untuk memperkuat hubungan antara transparansi dan kinerja organisasi.

Hasil ini tidak berarti bahwa komitmen organisasi tidak penting bagi BPKAD Kabupaten Sarolangun. Komitmen organisasi tetap dibutuhkan untuk mendorong pegawai bekerja secara bertanggung jawab dan mendukung tujuan organisasi. Namun, dalam hubungan antara transparansi dan kinerja, peran komitmen organisasi belum terbukti sebagai faktor yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja melalui transparansi lebih tepat diarahkan pada penguatan sistem keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, kualitas pelaporan, dan kemudahan akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, transparansi tetap menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja BPKAD Kabupaten Sarolangun, tetapi pengaruh tersebut tidak diperkuat oleh komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. BPKAD perlu memperkuat transparansi melalui penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, organisasi perlu memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam konteks penelitian ini belum terbukti secara statistik mampu meningkatkan kinerja organisasi. Akuntabilitas tetap merupakan prinsip penting dalam tata kelola keuangan daerah, tetapi penerapannya perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kewajiban administratif dan pelaporan, melainkan juga pada evaluasi kinerja, perbaikan program, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil.

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, kemudahan akses informasi, dan ketepatan waktu penyampaian informasi dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, transparansi menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah karena mampu mendorong pengawasan, meningkatkan ketertiban pelaksanaan tugas, dan memperkuat akuntabilitas organisasi.

Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Artinya, tinggi atau rendahnya komitmen organisasi pegawai belum terbukti dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara akuntabilitas dan kinerja organisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja lebih banyak ditentukan oleh sistem, regulasi, mekanisme pertanggungjawaban, dan kualitas evaluasi kinerja daripada oleh komitmen individual pegawai semata.

Komitmen organisasi juga tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap kinerja lebih bersifat langsung dan tidak bergantung pada tingkat komitmen organisasi pegawai. Oleh karena itu, peningkatan kinerja melalui transparansi perlu difokuskan pada penguatan sistem keterbukaan informasi, penyediaan data yang akurat, prosedur publikasi yang jelas, serta kemudahan akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Aituarauw, I. F. A. (2021). Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 99–110.

Holil Absor, Kabul Wahyu Utomo & Syafrudin, Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja BPKAD dengan Moderasi Komitmen Organisasi

- Amali, M. N., & Suwandi, D. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Kebumen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen*, 10(11). <https://www.inikebumen.net>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–41.
- DR HA Rusdiana, M. M., & Nasihudin, M. P. (2021). *Akuntabilitas: Kinerja dan pelaporan penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Jiman, M. N. T. D. W., Kerih, A. S. Y., & Dethan, M. A. (2025). Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja, SPIP, dan Akuntabilitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur: Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 223–235.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.
- Nabila, P., & Maulina, I. (2025). Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, 5(1), 1–11.
- Nailufar, F., Si, S. E. M., Juanda, R., Dev, M. E., Albra, W., Si, S. E. M., & SE, J. A. (2026). *Otonomi Dan Keuangan Daerah*. Lenggo Geni Pustaka.
- Prasetyo, P. (2024). *Menanamkan Nilai Religiusitas Melalui Good Government Governance dan Implementasi SAP Dalam Komitmen Organisasi*. PT Salim Media Indonesia.
- PRATAMA, E. A., YUDI, Y., & KUSUMASTUTI, R. (2026). *PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH)*.
- Putri, B. I., Astuti, A., & Afianta, A. Y. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 5(2).
- Rohmi, P. K. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 155–162.
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan fraud di instansi pemerintah (Studi kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156.
- Sagala, R. (2020). Transparansi Laporan Keuangan Sebagai Media Komunikasi dan Informasi bank Papua dalam keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 4(2), 75–97.
- Saputra, D. S., & Darwanis, S. A. (2014). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan komitmen organisasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (studi pada pemda kabupaten aceh selatan). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2).
- Shaleh, M., & Firman, S. P. (2018). *Komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai*. Penerbit Aksara Timur.
- Theresiana, M., & Supriyadi, S. (2025). Kinerja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Samarinda. *MLJ Merdeka Law Journal*, 6(1), 60–68.
- Yusnety, Y. (2025). Analisis Penerapan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 3(2), 17–23.